

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bagian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan akibat rotasi jabatan tahun 2021 terjadi karena ada dua konflik didalamnya. Yang pertama konflik individu dan yang kedua konflik politik kepentingan. Konflik individu terjadi disebabkan di antaranya oleh tiga hal yaitu memori buruk yang terjadi antara Ibu Utje Suganda (Ibunda dari Ridho Suganda) dengan Acep Purnama. Kurangnya Komunikasi atau terjadinya miskomunikasi, kurangnya pemahaman terkait tugas, fungsi dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Konflik politik kepentingan yang terjadi disebabkan karena keduanya memiliki kekuasaan yang berpengaruh di Kabupaten Kuningan serta perebutan kekuasaan untuk menjadi eksekutif di periode yang akan datang.

Untuk gaya manajemen yang dilakukan untuk penyelesaian konflik individu belum dilakukan. Karena berdasarkan wawancara di lapangan, bahwa keduanya memang terlihat tidak akur, karena ada masalah pribadi antara keduanya. Namun Adapun gaya manajemen konflik yang dapat ditawarkan di antaranya adalah akomodasi, kompromis dan kolaborasi.

Berdasarkan lima gaya manajemen konflik dari Thomas dan Kilmann dalam buku Prof. DR. Winardi. SE., Gaya manajemen konflik yang digunakan dalam

penyelesaian konflik antara Bupati dan Wakil Bupati adalah akomodasi. Gaya manajemen konflik akomodasi ini dinilai dari tingginya sikap kooperatif dibandingkan sikap asertifnya. Penyelesaian konflik ini dilakukan di DPP PDI-P Jawa Barat. Penyelesaian konflik ini dihadiri oleh Bapak Ono Surono. Akomodasi mencerminkan memiliki kerja sama yang tinggi. Gaya ini digunakan untuk menjaga keselarasan serta digunakan saat sedang membangun citra sosial untuk waktu mendatang. Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati ada Rotasi Jabatan di Kabupaten Kuningan tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai keselarasan dan membangun citra sosial bagi PDI-Perjuangan. Namun fakta dilapangan, mengatakan bahwa hubungan antara Acep dan Ridho masih tidak akur. Ketika keduanya hadir dalam satu acara bersamaan masih ada jarak diantara keduanya. Namun ada gaya manajemen konflik lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik yang terjadi yaitu kompromis dan kolaborasi.

Adapun dampak dari konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dalam rotasi jabatan tahun 2021 yaitu berdampak positif dan negatif bagi partai PDI-P itu sendiri. Kemudian memberikan dampak bagi partai pendukung yaitu NASDEM dan hal ini juga memberikan dampak pada pemerintahan di antaranya adalah pelayanan pemerintahan pada saat pandemic Covid-19 hingga pasca Covid-19.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa dapat diketahui penyebab dari konflik yang terjadi adalah adanya miskomunikasi, kurangnya pemahaman

tugas, fungsi dan wewenang kepala dan wakil kepala daerah serta adanya konflik pribadi. Dengan begitu, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikawinkan oleh partai perlu untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan melakukan komunikasi dengan baik. Memiliki komunikasi yang baik, akan menghindari keduanya dari kesalahpahaman yang terjadi. Selain itu keduanya perlu saling menghargai dan merangkul untuk menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan.

Selain itu, dalam penyelesaian permasalahannya menggunakan gaya manajemen konflik Thomas dan Killen yaitu akomodasi. Keduanya ini dipertemukan oleh ketua DPP PDI-P dengan maksud untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Memberikan jalan tengah untuk tetap harmonis dan menjaga citra sosial dan politik dari partai PDI-P itu sendiri, bahkan pihak yang berkonflik diberikan surat peringatan. Seharusnya dengan adanya surat peringatan dan panggilan membuat keduanya sadar dan kembali harmonis. Karena untuk menjalankan roda pemerintahan, diperlukan keduanya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki wilayah dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dari konflik yang terjadi antara Acep dan Ridho memberikan dampak yang merugikan bagi beberapa pihak, yaitu bagi PDI-P, NASDEM, dan Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, perlu dilakukan perumusan strategi untuk pencegahan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga untuk masa yang akan datang tidak akan terulang kembali konflik yang sama. Karena ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah berkonflik maka yang akan terkena dampaknya adalah masyarakatnya sendiri. Maka dari itu penulis mengharapkan peneliti

selanjutnya dapat meneliti terkait dengan strategi dalam pencegahan konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga nantinya hal tersebut dapat membantu pemerintahan untuk menghadapi hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.